KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Wacana BGN terapkan sistem prasmanan MBG di sekolah
Tanggal : Minggu, 11 Oktober 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 2

Wacana BGN Terapkan Sistem Prasmanan MBG Di Sekolah

Badan Gizi Nasional (BGN) terus berupaya meningkatkan kualitas pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Salah satu inovasi yang dilakukan adalah penerapan sistem prasmanan.

Sistem ini dinilai mampu menjaga kualitas makanan yang disajikan kepada para penerima manfaat. Langkah BGN ini pun menjadi perbincangan.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengatakan, sebanyak 60 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) atau dapur MBG menjadi lokasi uji coba (pilot project) inovasi tersebut. Uji coba mulai berjalan pada Senin (5/10/2026).

"Pada tanggal 5 ini, kita sudah melakukan uji coba di mungkin lebih dari 60 dapur untuk prasmanan di kelas. Makanan dibawa dalam keadaan hangat ke kelas, kemudian disajikan di kelas. Ini sedang kita uji coba," kata Sudaryono melalui akun Instagram pribadinya, *@sudarusudaryono*, Selasa (6/10/2026).

Juru Bicara BGN Tysa Novenny mengatakan, evaluasi dilakukan setiap hari dengan melibatkan SPPG dan sekolah yang menjadi lokasi uji coba.

"Ini baru berjalan tiga hari sejak 5 Oktober. Evaluasi tentu kami lakukan setiap hari, baik terhadap SPPG maupun sekolah," ujar Tysa, Rabu (7/10/2026), dikutip dari *KONTAN*.

Untuk memperkuat evaluasi, BGN juga menerjunkan tim ke sejumlah SPPG dan sekolah. Tim tersebut memeriksa pelaksanaan skema prasmanan, sekaligus memastikan pengisian format pelaksanaan berjalan sesuai dengan kebutuhan evaluasi.

"Saat ini, tim dari BGN tengah menyebar ke beberapa SPPG dan sekolah yang menjadi lokasi uji coba untuk memeriksa pelaksanaan dan pengisian format pelaksanaan," kata Tysa.

Selain belum merilis data hasil evaluasi, BGN juga belum mengumumkan secara terperinci daftar sekolah yang menjadi lokasi uji coba dari lebih dari 60 SPPG tersebut. BGN masih melakukan pemantauan di sejumlah SPPG dan sekolah yang menjadi lokasi uji coba dalam beberapa hari ke depan untuk memperoleh hasil evaluasi yang lebih lengkap.

Anggota Komisi IX DPR Irma Suryani Chaniago mendukung langkah Pemerintah yang mewacanakan penerapan sistem prasmanan dalam distribusi MBG. Menurut dia, sistem prasmanan dapat diterapkan di sekolah-sekolah yang memiliki fasilitas memadai.

"Pemberian makanan bisa dilakukan secara prasmanan di dapur masing-masing yang lokasinya tidak berjauhan," ujar Irma Suryani kepada *Rakyat Merdeka*, Jumat (9/10/2025).

Sementara itu, Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Brawijaya, Malang, Andhyka Muttaqin berpandangan wacana penerapan sistem prasmanan berpotensi memperbaiki pengalaman makan siswa, memberikan keleluasaan dalam mengambil makanan, dan mengurangi sisa makanan. Namun, menurut dia, sistem prasmanan belum menyelesaikan persoalan utamanya.

"Pemerintah harus memprioritaskan pembenahan tata kelola MBG agar program ini benar-benar aman, bergizi, akuntabel, dan mampu memperoleh kembali kepercayaan masyarakat," jelas Andhyka kepada *Rakyat Merdeka* melalui pesan *WhatsApp*, Jumat (9/10/2026).

Untuk mengetahui pandangan Irma Suryani Chaniago dan Andhyka Muttaqin mengenai wacana distribusi MBG dengan sistem prasmanan, berikut wawancaranya.

IRMA SURYANI CHANIAGO,
Anggota Komisi IX DPR

Yang Pasti Harganya Tak Lagi Rp 10 Ribu



> Harus diperhatikan ketersediaan ruang makan yang memadai, dengan jumlah kursi dan meja yang cukup.

Bagaimana Anda melihat langkah Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan inovasi distribusi Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan sistem prasmanan?

Ide ini bagus untuk sekolah yang memiliki dapur dan ruang makan yang memadai. Kemudian, sekolah yang bisa menerapkan sistem prasmanan merupakan sekolah terpadu, yakni sekolah yang memiliki jenjang SD, SMP, dan SMA dalam satu lokasi. Dengan demikian, pemberian makanan bisa dilakukan secara prasmanan di dapur masing-masing yang lokasinya tidak berjauhan.

Hal apa saja yang harus diperhatikan dalam sistem prasmanan ini?

Harus diperhatikan ketersediaan ruang makan yang memadai, dengan jumlah kursi dan meja yang cukup. Selain itu, dengan sistem prasmanan, harga makanan tidak bisa lagi Rp 10 ribu per porsi. Sebab, penyajian makanan secara prasmanan tentu membutuhkan pelayanan yang berbeda.

Apa yang menjadi pembeda dari segi makanannya?

Pastinya, harga makanan tidak bisa lagi hanya Rp 10 ribu. Sebab, menu yang ditawarkan harus cukup beragam. Ada sayuran, buah, lauk (protein), lauk pendamping, tempe, tahu, bakwan sayuran, perkedel, air mineral, dan susu.

Anda juga menyebut soal pelayanan. Apakah hal ini akan berpengaruh terhadap anggaran BGN?

Nah, insentif bagi petugas yang melayani penyajian makanan tentu harus disesuaikan. Ini bukan gaji, melainkan upah karena posisi mereka bukan pekerja, melainkan relawan. Saat ini, pendapatan mereka hanya Rp 1,5 juta sampai Rp 2 juta.

Artinya, harus ada penyesuaian anggaran untuk insentif petugasnya?

Menurut saya, mereka sudah bekerja dari pukul 21.00 hingga pukul 05.00, bahkan bisa sampai pukul 07.00. Jika masih harus melayani prasmanan di sekolah-sekolah, tentu harus ada perhitungan upah lembur.

Mengapa pelayanan prasmanan tidak diserahkan saja kepada pihak sekolah atau kantin sekolah?

Kalau diserahkan kepada pihak sekolah atau kantin sekolah, nanti justru bisa menimbulkan masalah lagi. Pekerjaan guru untuk mengajar bisa terganggu. ■ NNM

ANDHYKA MUTTAQIN,
Pengamat Kebijakan Publik Universitas Brawijaya

Sistem Prasmanan Tak Menyelesaikan Masalah



> Tanpa perbaikan mendasar tersebut, inovasi penyajian hanya akan menjadi perubahan kosmetik yang tidak menyelesaikan krisis kepercayaan.

Bagaimana Anda melihat langkah Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan inovasi distribusi Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan sistem prasmanan di sekolah?

Program MBG memiliki tujuan penting, yaitu mendukung pemenuhan gizi anak-anak Indonesia. Namun, keberhasilan program ini tidak cukup diukur dari banyaknya makanan yang dibagikan atau besarnya anggaran yang dialokasikan.

Lalu, hal apa yang harus menjadi indikator keberhasilannya?

Persoalan keamanan pangan, kualitas makanan, ketepatan pelayanan, dan transparansi pengelolaan menjadi faktor penting yang menentukan apakah manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat.

Sistem prasmanan bertujuan meningkatkan kualitas MBG. Apa tanggapan Anda?

Ketika muncul berbagai keluhan mengenai pelaksanaan MBG, kepercayaan masyarakat menjadi hal yang perlu mendapat perhatian serius. Sebab, dalam kebijakan publik, tujuan yang baik tidak otomatis menghasilkan pelaksanaan yang baik.

Artinya, Pemerintah, dalam hal ini BGN, harus memperbaiki kepercayaan masyarakat terhadap program MBG?

Ya, kepercayaan tumbuh ketika masyarakat melihat bahwa pelayanan berjalan sesuai standar, masalah ditangani secara terbuka, dan Pemerintah bertanggung jawab atas setiap kekurangan.

Dalam konteks tersebut, wacana penerapan sistem prasmanan menarik untuk dikaji. Sistem ini berpotensi memperbaiki pengalaman makan siswa, memberikan keleluasaan dalam mengambil makanan, dan mengurangi sisa makanan. Namun, apakah sistem ini bisa menyelesaikan masalah utamanya.

Apa maksud Anda?

Dari perspektif kebijakan publik, prasmanan bukanlah solusi utama.

Mengapa bukan solusi utama?

Sebab, prasmanan hanya salah satu alternatif yang harus diuji berdasarkan bukti dan kesiapan pelaksanaannya. Pemerintah perlu menegaskan bahwa pembenahan tata kelola, mulai dari standar keamanan pangan, pengawasan kualitas, transparansi anggaran, mekanisme pengaduan, hingga evaluasi yang terbuka, merupakan prioritas yang tidak dapat ditunda. ■ NNM